

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Manajemen pendidikan di Indonesia merupakan titik sentral dalam mewujudkan tujuan pembangunan Sumber Daya Manusia. Dalam pengamatannya, manajemen pendidikan di Indonesia masih belum menampakkan kemampuan profesional sebagaimana yang diinginkan, masalah manajemen pendidikan merupakan salah satu masalah pokok yang menimbulkan krisis dalam dunia pendidikan Indonesia.

Kondisi ini disebabkan karena tidak adanya tenaga-tenaga administrator pendidikan yang profesional. Oleh karena itu, hal penting yang harus dipertimbangkan bagi sebuah institusi pendidikan adalah adanya tenaga administrator pendidikan yang profesional. Dalam pengelolaan administrasi pendidikan, diperlukan kualitas personil yang memadai, dalam arti penempatan orang yang tepat sesuai dengan kompetensi yang diperlukan untuk kinerja yang efektif dan efisien. Faktor manajemen merupakan salah satu faktor yang dapat memberikan efek terhadap prestasi belajar siswa.

Seiring dengan diberlakukannya otonomi daerah, maka telah terjadi perubahan paradigma dalam pengelolaan pendidikan yang antara lain telah memunculkan suatu model dalam manajemen pendidikan, yaitu *school based management*. Model manajemen ini pada dasarnya memberikan peluang yang sangat besar (otonomi) kepada sekolah untuk mengelola dirinya sesuai dengan

kondisi yang ada serta memberikan kesempatan kepada masyarakat (stakeholders) untuk ikut berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan pendidikan. Konsekuensi dari pelaksanaan manajemen berbasis sekolah dalam setiap satuan, jenis, dan jenjang pendidikan antara lain sangat diperlukan adanya kemampuan manajerial yang cukup memadai dari kepala sekolah dan didukung oleh adanya kinerja guru yang professional (Arif. 2010 : 1).

Dewasa ini kualitas penyelenggaraan pendidikan pada berbagai lembaga pendidikan cukup bervariasi. Hal ini bisa diamati dari berbagai aspek, baik aspek-aspek yang terkait dengan masukan instrumental, seperti kurikulum tenaga pengajar, bahan ajar, maupun masukan lingkungan seperti kondisi lingkungan fisik dan manajerial kepala sekolah, aspek-aspek yang terkait dengan proses, seperti proses belajar-mengajar dan sarana serta prasarana yang dibutuhkan, maupun aspek-aspek yang terkait dengan keluaran, seperti hasil ujian dan keterserapan lulusan oleh para tenaga kerja.

Salah satu upaya untuk meningkatkan mutu lulusan dan kualitas pendidikan dasar, Menteri Pendidikan Nasional mengeluarkan keputusan No. 087/U/2002 tentang Akreditasi Sekolah. Keputusan tersebut kemudian diperkuat dengan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang kemudian dijabarkan dalam PP No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang lahir kemudian. Keputusan Mendiknas di atas dengan tegas menunjuk seluruh sekolah agar diakreditasi, baik sekolah negeri atau swasta. Hal ini merupakan kemajuan yang luar biasa karena sebelumnya Ditjen Dikdasmen melalui keputusan Dirjen No.

020/C/Kep/1/1983 menyebutkan akreditasi hanya diberlakukan untuk sekolah swasta.

Akuntabilitas lembaga penyelenggara pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dapat diketahui dari peringkat akreditasi yang dimiliki sekolah, hal ini sesuai dengan ayat 2 Pasal 60 UU No. 20 tahun 2003 yang menyatakan bahwa akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan pemerintah dan/lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik. Peringkat akreditasi tersebut harus benar-benar menggambarkan kualitas sekolah sehingga masyarakat memperoleh gambaran yang jelas tentang kualitas sekolah. Mengingat pentingnya akreditasi baik bagi sekolah maupun masyarakat, perlu dilakukan studi tentang pengembangan model penyelenggaraan akreditasi pada pendidikan dasar.

Sekolah yang terakreditasi amat baik sudah barang tentu merupakan sekolah yang dianggap berkualitas. Demikian juga sebaliknya, sekolah yang terakreditasi cukup, tentunya masyarakat menganggap sekolah tersebut kurang berkualitas (Adi. 2010 : 3).

Akreditasi sekolah adalah kegiatan penilaian kelayakan suatu sekolah berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dan dilakukan oleh Badan Akreditasi Sekolah (BAS), yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk pengakuan peringkat kelayakan. Kegiatan tersebut bertujuan untuk memperoleh gambaran kinerja sekolah yang dapat digunakan sebagai alat pembinaan, pengembangan, dan peningkatan mutu pendidikan. Juga untuk menentukan tingkat kelayakan suatu sekolah dalam penyelenggaraan

pendidikan. Sekolah yang diakreditasi meliputi TK, SD, SDLB, SLTP, SMU, dan SMK, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, maupun masyarakat.

Keputusan Mendiknas nomor 087/U/2002 tentang akreditasi sekolah dengan tegas menunjukkan seluruh sekolah agar diakreditasi, baik sekolah negeri (diselenggarakan pemerintah) maupun sekolah swasta (diselenggarakan masyarakat).

Akreditasi terhadap semua sekolah tanpa kecuali, baik negeri maupun swasta, kiranya sejalan dengan kebijakan umum menyangkut otonomi pendidikan dan manajemen berbasis sekolah. Setiap sekolah mesti secara otonom mengelola seluruh penyelenggaraan pendidikan, bahkan dalam hal pendanaan sekali pun di sisi lain, pihak pemerintah dapat mengambil "jarak" terhadap sekolah-sekolah yang selama ini diproteksinya habis-habisan. Jika prinsip keadilan dan kejujuran sebagaimana tersurat dalam ketentuan umum akreditasi sungguh diterapkan, maka keberadaan BAS akan mempunyai arti bagi peningkatan mutu semua sekolah.

Akreditasi sekolah harus diletakkan dalam konteks peningkatan mutu pendidikan dan otonomi sekolah. Keprihatinan akan rendahnya mutu pendidikan dan otonomi sekolah. Keprihatinan akan rendahnya mutu pendidikan, terutama untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah, setidaknya menyangkut faktor yang dipandang sebagai biang rendahnya mutu pendidikan. Faktor tersebut menyangkut penyelenggaraan sekolah yang birokratik sentris dan bergantung pada petunjuk pelaksanaan (juklak) atau

petunjuk teknis (juknis); penyelenggaraan sekolah yang hanya memperhitungkan faktor-faktor input, seperti guru, kurikulum, siswa, buku dan fasilitas belajar. Acapkali kepala sekolah menempatkan dirinya sebagai kepanjangan tangan pengawas atau atasan yang berupa birokrat Depdiknas.

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan terdapat kesan bahwa akreditasi yang dilakukan terhenti sebatas kegiatan administratif belaka. Namun pelaksanaan akreditasi di SD Negeri 2 Mranti Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo dilakukan dengan tujuan sebagai "sarana" untuk meningkatkan mutu pendidikan. Kepala sekolah dan segenap staf di SD Negeri 2 Mranti Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo bekerja sama dalam pelaksanaan akreditasi yang dilakukan setiap lima tahun sekali tersebut. Hasil dari akreditasi yang didapatpun mengalami peningkatan, hal ini tidak lepas dari pengelolaan akreditasi yang dilakukan oleh kepala SD Negeri 2 Mranti Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo.

Berdasarkan uraian di atas penelitian akan melakukan penelitian mengenai Pengelolaan akreditasi sekolah di SD Negeri 2 Mranti Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo.

B. Fokus Penelitian

Sesuai dengan latar belakang masalah penelitian di atas, maka fokus penelitian ini adalah, "Bagaimana pengelolaan akreditasi sekolah di SD Negeri 2 Mranti Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo?". Adapun Subfokus penelitian ini terbagi menjadi tiga.

1. Bagaimana penyusunan evaluasi diri sekolah dalam akreditasi sekolah di SD Negeri 2 Mranti Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo?
2. Bagaimana proses visitasi dalam akreditasi sekolah di SD Negeri 2 Mranti Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo?
3. Bagaimana hasil akreditasi sekolah di SD Negeri 2 Mranti Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah.

1. Untuk mendeskripsikan penyusunan evaluasi diri sekolah dalam akreditasi sekolah di SD Negeri 2 Mranti Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo.
2. Untuk mendeskripsikan proses visitasi dalam akreditasi sekolah di SD Negeri 2 Mranti Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo.
3. Untuk mendeskripsikan hasil akreditasi sekolah dalam akreditasi sekolah di SDN 2 Mranti Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo.

D. Manfaat Penelitian

Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik yang bersifat teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam melakukan kegiatan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan kualitas sekolah.

Selebihnya penelitian ini juga akan bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan menambah khasanah bagi manajemen pendidikan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini bermanfaat bagi:

- a. Kepala sekolah, sebagai masukan bagi upaya pengembangan konsep manajemen pendidikan, khususnya yang berkenaan dengan pengembangan kualitas sekolah pada SD Negeri 2 Mranti Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo;
- b. Guru dan stakeholder, sebagai informasi secara empiris tentang pengelolaan akreditasi sekolah dasar sehingga dapat dijadikan landasan kerja bagi stakeholder pendidikan dalam mengembangkan kualitas sekolah, khususnya pada SD Negeri 2 Mranti Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo.
- c. Stackholder, Dapat dijadikan landasan kerja dalam mengembangkan kualitas sekolah, khususnya pada SD Negeri 2 Mranti Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo.

E. Definisi Istilah

1. Pengelolaan Sekolah

Pengelolaan sekolah adalah proses instansi yang memimpin dan membimbing penyelenggaraan pekerjaan sekolah sebagai suatu organisasi dalam mewujudkan tujuan pendidikan dan tujuan sekolah yang telah ditetapkan

2. Akreditasi Sekolah

Akreditasi sekolah kegiatan penilaian yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang, untuk menentukan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non-formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan, berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, sebagai bentuk akuntabilitas publik yang dilakukan secara obyektif, adil, transparan, dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan.

3. Evaluasi Diri Sekolah

Evaluasi Diri Sekolah (EDS) adalah proses yang mengikutsertakan semua pemangku kepentingan untuk membantu sekolah dalam menilai mutu penyelenggaraan pendidikan berdasarkan indikator-indikator yang mengacu pada standar nasional pendidikan.

4. Visitasi

Visitasi adalah kunjungan ke sekolah/madrasah yang dilakukan oleh asesor untuk melakukan klarifikasi, verifikasi, dan validasi data serta informasi yang telah disampaikan oleh sekolah/madrasah melalui pengisian instrumen akreditasi

5. Hasil Akreditasi

Hasil akreditasi dalam penelitian ini adalah akibat dari adanya kegiatan akreditasi yang biasanya dapat dilihat dari nilai sertifikat akreditasi yang berisi kondisi sekolah.